

LAPORAN TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS
TRIWULAN IIII TAHUN 2024**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TINDAK LANJUT

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS TRIWULAN III TAHUN 2024

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar
Pada Hari Senin, 14 Oktober 2024

Top Management,

H. MOEH. PANDJI SANTOSO, S.H., M.H
NIP. 197002181996031003

Sekretaris Tim Survei,

NURIYA AWAD, S.H.
NIP. 197503302000032002

Ketua Tim Survey

SUTISNA SAWATI, S.H.
NIP. 197311231999031007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN IIII Tahun 2024.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Oktober 2024

Tim Survei

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Tujuan dan Sasaran.....	6
C. Prinsip	6
D. Pelaksanaan	7
E. Tahapan Pelaksanaan.....	7
BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN.....	8
BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	10
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Rekomendasi.....	20
RUJUKAN:	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Maksud Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Prinsip

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Transparan

Hasil survey persepsi anti korupsi harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

2. Partisipatif

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

3. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam Survey persepsi anti korupsi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

4. Berkesinambungan

Survey persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

5. Keadilan

Pelaksanaan Survey persepsi anti korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa mebedakan status ekonomi, budaya, agama,

6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey persepsi anti korupsi, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan JULI - SEPTEMBER 2024.

E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.
2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website :
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 104 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **91,34 % atau pada nilai 3,65**.

Hasil IPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Hasil
Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,643
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,893
U3	Menjual Pengaruh	3,821
U4	Transaksi Biaya	3,107
U5	Biaya Tambahan	3,393
U6	Hadiah	3,607
U7	Transparansi Biaya	3,714
U8	Percaloan	3,857
U9	Perbuatan Curang	3,643
U10	Transaksi Rahasia	3,857
	Total	36,5
	Rata Rata	3,65

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Indikator Hadiah (U6)	3,607	101
2	Indikator Biaya Tambahan (U5)	3,393	95
3	Indikator Transaksi Biaya (U4)	3,107	87

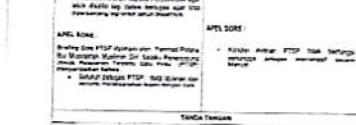
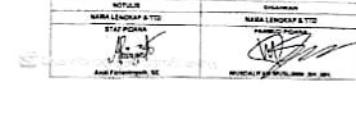
Adapun Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN III Tahun 2024 akan disajikan pada Bab 3.

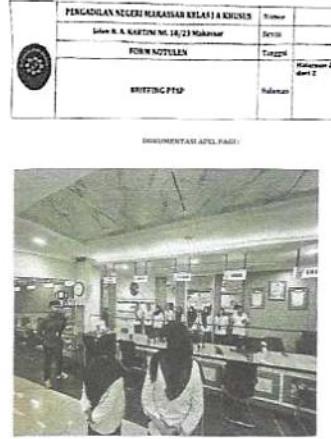
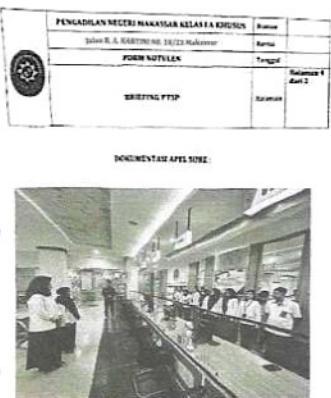
BAB III

TINDAK LANJUT

HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Adapun Tindak Lanjut 3 unsur terendah yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Tindak Lanjut
1.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)? (U6)	Mengarahkan para petugas PTSP agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.	<p>Memberikan pembekalan kepada petugas PTSP agar bekerja dengan Ikhlas dan penuh integritas dalam rangka peningkatan pelayanan Pengadilan Negeri Makassar yang prima. Seluruh Petugas PTSP diingatkan untuk menjaga integritas, bekerja seara Ikhlas, professional, dan penuh tanggung jawab.</p> <p>Berikut ini kegiatan yang dipimpin oleh Ibu Muzdalifah Muslimin, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana</p>     

			 <p>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS Surat R.J. KARTINI NO. 14/23 Makassar FORM PTSP Tanggal _____ Balasan _____ dari Z. SHEETING PTSP Balasan _____</p> <p>DOCUMENTASI APPL PAGI</p> 
			 <p>PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS Surat R.J. KARTINI NO. 18/23 Makassar FORM PTSP Tanggal _____ Balasan _____ dari Z. SHEETING PTSP Balasan _____</p> <p>DOCUMENTASI APPL SIRE</p> 
2.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (U5)	Mengarahkan para petugas PTSP agar tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun diluar tarif/biaya resmi.	<p>Memberikan pembekalan kepada seluruh petugas PTSP agar senantiasa mengikuti SOP dalam melayani masyarakat. Petugas PTSP juga senantiasa diingatkan agar menjaga integritas demi nama baik instansi dan pribadi.</p> <p>Berikut ini salah satu kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, Ibu Andi Asni</p>

Sani, S.T., S.H., M.H. dan Ibu Nuriya Awad, S.H., pada Hari Kamis, 7 November 2024.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Nomor
Jalan Raya Kartini No 15/13 Makassar		Surat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		Tanggal
Bantuan Hukum		Penandatanganan
Dilengkapi STTP		Salinan

WAKTU/TANGGAL	KAMIS / 07 NOVEMBER 2024	WITNESSED/ TANDATANGNA
LOKASI DILAKUKAN	MEJA JEPIT	<input checked="" type="checkbox"/> BANTUAN HUKUM <input type="checkbox"/> INTERNAL PERIZIN
WILAYAH WAKTU DILAKUKAN	WILAYAH : ANGGAPAN HAKIM MITA	
PENGAWAS/ JAWAB	ABDI ADEKAMA, S.T, MM (ANGGAPAN HAKIM) WIBULANGGA, SE (PERIZIN PEMERINTAH)	
NOTULEN	BTU ANGGAPAN HAKIM PADA BANTUAN HUKUM	

LATIHAN BANTUAN HUKUM BERDASAR

Latihan Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, Jl. Raya Kartini No 15/13 Makassar. Dalam latihan ini, Bantuan Hukum dan Perizinan Pemerintah Sulawesi Selatan berdiskusi mengenai persidangan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan persidangan dengan baik.

1. Apabila Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mendengar tuntutan atau pertanyaan yang diajukan oleh pihak lain, apakah mereka akan memberikan jawaban yang jujur dan akurat?
 2. Apakah mereka siap dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus?
 3. Apakah mereka siap dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus?
- Apabila persidangan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus berlangsung dengan sukses, maka persidangan tersebut dianggap berhasil.
- KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KETUA PENGADMILAN NEGERI DAN
HAMID PENGADMILAN PTSP**

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Nomor
Jalan Raya Kartini No 15/13 Makassar		Surat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		Tanggal
Bantuan Hukum		Penandatanganan
Dilengkapi STTP		Salinan

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS		Nomor
Jalan Raya Kartini No 15/13 Makassar		Surat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan		Tanggal
Bantuan Hukum		Penandatanganan
Dilengkapi STTP		Salinan

A. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

1. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

2. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

3. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

4. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

5. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

6. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

7. Lantik Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dengan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

B. Tanda Tangan

NOTULEN: KAMI DENGKAP STTP STAFF SHM	DILENGKAPI STTP: KAMI DENGKAP STTP STAFF SHM
SIAGA: HUTI ANGKARA, SH	SIAGA: AHMAD SANI, S.T, M.Kn
PANDU: SRIYANTI, SH	PANDU: SRIYANTI, SH

3.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? (U4)	Mempublikasikan seluruh informasi biaya/tarif pelayanan melalui media sosial	<p>Berikut ini biaya/tarif pelayanan yang telah dipublikasikan di website resmi PN Makassar Kelas I A Khusus https://pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/biaya-perkara.</p>

I. PERILAKU DAN PERILAKU KONSEP DENGAN KONSEP
 (Dengan nilai sebagaimana diberikan pada Tabel 1)

A.1. Perilaku dan Perilaku KONSEP DENGAN KONSEP

Zonifikasi untuk analisis

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata PDRP LSL	Rp. 10.000,-
3.	Rata PDRP di Tempat	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Logistik	Rp. 10.000,-
5.	Rata PDRP Pengaruh Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-
6.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Tempat	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.2. Perilaku KONSEP - Pendekar (Perilaku dan Perilaku KONSEP DENGAN KONSEP)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Logistik	Rata Rata
5.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.3. KONSEP

Note: Penilaian ini adalah nilai Rata Rata Logistik yang tidak ada analisis.
 Data Pendekar berdasarkan Sumber 1 dan data pendekar berdasarkan Sumber 2.
 Apabila ada nilai yang tidak dibutuhkan seperti Angka 0, maka angka tersebut dianggap tidak ada nilai.
 Data Pendekar

1. Rata Pendekar = $\frac{10.000 + 10.000}{2} = 10.000$ Rp. 10.000,-

2. Rata Pendekar = $\frac{10.000 + 10.000}{2} = 10.000$ Rp. 10.000,-

Pendekar = $\frac{10.000 + 10.000}{2} = 10.000$ Rp. 10.000,-

A.4. Perilaku Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.5. Perilaku Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.6. Perilaku Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.7. Pendekar Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.8. Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.9. Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.10. Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

A.11. Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar Pendekar (Perilaku dan Perilaku Pendekar)

No.	KONSEP	RATA
1.	Rata PDRP Pendekar	Rp. 10.000,-
2.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
3.	Rata Tempat LSL	Rp. 10.000,-
4.	Rata Pengaruh Pendekar	Rata Rata
5.	Rata Pendekar Pendekar	Rata Rata
6.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
7.	Rata Pendekar	Rp. 10.000,-
8.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada Pendekar	Rp. 10.000,-
9.	Rata Pendekar	Rata Rata
10.	Rata PDRP Pendekar Pendekar Pada 1	Rp. 20.000,-

Bemerkungen:																																			
- Sehr Preiswerte Investition, wenn Projekt abgeschlossen ist, kann der Betrag nicht mehr vertrieben werden.																																			
- Wenn ein Projekt langfristig kein positiver Nutzen erzielen kann, kann es abgelehnt werden.																																			
1. Wert eines Mindestumsatzes von 1.000,- bis 1.500,- 2. Wert eines SEZ-Gebäudes mit ca. 1.000,- bis 1.500,- 3. Kosten eines neuen Autos Anzahl von Pflanzen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungsdauer und Kosten. - Wenn Preiswerte für Pflanzen Sparsame Pflanze für 100,-																																			
B.2 Projektkündigungswerten berechnet:																																			
<table border="1"> <thead> <tr><th>Wert</th><th>Wert</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Wert eines Mindestumsatzes</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>2. Wert eines SEZ-Gebäudes</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>3. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>4. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>5. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>6. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>7. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>8. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>9. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>10. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>11. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>12. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>13. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>14. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>15. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> </tbody> </table>				Wert	Wert	1. Wert eines Mindestumsatzes	Ap 1.000,-	2. Wert eines SEZ-Gebäudes	Ap 1.000,-	3. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	4. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	5. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	6. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	7. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	8. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	9. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	10. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	11. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	12. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	13. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	14. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	15. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-
Wert	Wert																																		
1. Wert eines Mindestumsatzes	Ap 1.000,-																																		
2. Wert eines SEZ-Gebäudes	Ap 1.000,-																																		
3. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
4. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
5. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
6. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
7. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
8. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
9. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
10. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
11. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
12. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
13. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
14. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
15. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
Kontrollen:																																			
- Wenn ein Projekt mit "100% Absatz Preis 100,- Ap 1.000,-" der Wert Preiswerte ist, dann ist es kein Preiswerte Projekt.																																			
- Spezifische Anzahl von Pflanzen entspricht der tatsächlichen Nutzungsdauer und Kosten.																																			
- Wenn ein Projekt mit "100% Absatz Preis 100,- Ap 1.000,-" der Wert Preiswerte ist, dann ist es kein Preiswerte Projekt.																																			
1. Wert eines Mindestumsatzes von 1.000,- bis 1.500,- 2. Wert eines SEZ-Gebäudes mit ca. 1.000,- bis 1.500,- 3. Kosten eines neuen Autos Anzahl von Pflanzen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungsdauer und Kosten. - Wenn Preiswerte für Pflanzen Sparsame Pflanze für 100,-																																			
B.2 Projektkündigungswerten berechnet B-C nach:																																			
<table border="1"> <thead> <tr><th>Wert</th><th>Wert</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Wert eines Mindestumsatzes</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>2. Wert eines SEZ-Gebäudes</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>3. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>4. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>5. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>6. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>7. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>8. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>9. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>10. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>11. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>12. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>13. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>14. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>15. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> </tbody> </table>				Wert	Wert	1. Wert eines Mindestumsatzes	Ap 1.000,-	2. Wert eines SEZ-Gebäudes	Ap 1.000,-	3. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	4. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	5. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	6. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	7. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	8. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	9. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	10. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	11. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	12. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	13. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	14. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	15. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-
Wert	Wert																																		
1. Wert eines Mindestumsatzes	Ap 1.000,-																																		
2. Wert eines SEZ-Gebäudes	Ap 1.000,-																																		
3. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
4. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
5. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
6. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
7. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
8. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
9. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
10. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
11. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
12. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
13. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
14. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
15. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
Wertkennzeichnung:																																			
- Setzt Voraussetzung, dass Wertkennzeichnung B-C-Wert ist. - Nur Preiswerte Investitionen können Wertkennzeichnung B-C-Wert haben.																																			
- Spezifische Anzahl von Pflanzen entspricht der tatsächlichen Nutzungsdauer und Kosten.																																			
- Wenn ein Projekt mit "100% Absatz Preis 100,- Ap 1.000,-" der Wert Preiswerte ist, dann ist es kein Preiswerte Projekt.																																			
B.2 Projektkündigungswerten berechnet B-C nach:																																			
<table border="1"> <thead> <tr><th>Wert</th><th>Wert</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Wert eines Mindestumsatzes</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>2. Wert eines SEZ-Gebäudes</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>3. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>4. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>5. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>6. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>7. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>8. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>9. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>10. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>11. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>12. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>13. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>14. Kosten eines neuen Hauses</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> <tr><td>15. Kosten eines neuen Autos</td><td>Ap 1.000,-</td></tr> </tbody> </table>				Wert	Wert	1. Wert eines Mindestumsatzes	Ap 1.000,-	2. Wert eines SEZ-Gebäudes	Ap 1.000,-	3. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	4. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	5. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	6. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	7. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	8. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	9. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	10. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	11. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	12. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	13. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-	14. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-	15. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-
Wert	Wert																																		
1. Wert eines Mindestumsatzes	Ap 1.000,-																																		
2. Wert eines SEZ-Gebäudes	Ap 1.000,-																																		
3. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
4. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
5. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
6. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
7. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
8. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
9. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
10. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
11. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
12. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
13. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
14. Kosten eines neuen Hauses	Ap 1.000,-																																		
15. Kosten eines neuen Autos	Ap 1.000,-																																		
Kontrollen:																																			
- Wertkennzeichnung ist nur dann möglich, wenn Preiswerte Investitionen vorgenommen wurden.																																			
- Spezifische Anzahl von Pflanzen entspricht der tatsächlichen Nutzungsdauer und Kosten.																																			
1. Kosten eines neuen Autos 2. Kosten eines neuen Hauses 3. Kosten eines neuen Autos 4. Kosten eines neuen Hauses 5. Kosten eines neuen Autos 6. Kosten eines neuen Hauses 7. Kosten eines neuen Autos 8. Kosten eines neuen Hauses 9. Kosten eines neuen Autos 10. Kosten eines neuen Hauses 11. Kosten eines neuen Autos 12. Kosten eines neuen Hauses 13. Kosten eines neuen Autos 14. Kosten eines neuen Hauses 15. Kosten eines neuen Autos																																			
Kontrollen:																																			
- Wertkennzeichnung ist nur dann möglich, wenn Preiswerte Investitionen vorgenommen wurden.																																			
- Spezifische Anzahl von Pflanzen entspricht der tatsächlichen Nutzungsdauer und Kosten.																																			
1. Kosten eines neuen Autos 2. Kosten eines neuen Hauses 3. Kosten eines neuen Autos 4. Kosten eines neuen Hauses 5. Kosten eines neuen Autos 6. Kosten eines neuen Hauses 7. Kosten eines neuen Autos 8. Kosten eines neuen Hauses 9. Kosten eines neuen Autos 10. Kosten eines neuen Hauses 11. Kosten eines neuen Autos 12. Kosten eines neuen Hauses 13. Kosten eines neuen Autos 14. Kosten eines neuen Hauses 15. Kosten eines neuen Autos																																			

II. Panjai-Suk U.2 Name	1984/85	2014/15
<input checked="" type="checkbox"/> Dara Kiri (Left Hand)		Right
<input checked="" type="checkbox"/> Dara Kiri (Left Hand) - 2014/15		Right

Farge "Sku" registrert i de følgende		
1.	Blaa	18-12-09
2.	Brune	18-12-09
3.	Grønne	18-12-09
4.	Sorte	18-12-09
5.	Andre farger	18-12-09

Variables	Sample	Mean	SD
Score Association with Death	All	2.10 (0.84)	
Score Preference for Ethics	All	2.11 (0.84)	
1. Being Transcendent - Knowledge	All	0.67 (0.59)	
2. Being Transcendent - Ethics	All	0.65 (0.59)	
3. Being Transcendent - Spirit	All	0.65 (0.59)	
4. Being Transcendent - Self	All	0.65 (0.59)	
5. Being Transcendent - Other	All	0.65 (0.59)	
6. Being Transcendent - Total	All	0.65 (0.59)	

<u>Periods Not Received</u>	<u>TOTAL</u>	<u>AMOUNT</u>
1. PMSI Prepayment Due	Rp	20,000,-
2. PMSI Prepayment Due	Rp	10,000,-
3. Micro Finance	Rp	10,000,-
4. Indomaret Pre-Booking	Rp	2,000,000,-
5. PMSI Service Audit Due	Rp	10,000,-
6. Indomaret Pre-Booking Bln. 6/1 until 7/18/1	Rp	200,000,-

PAYER ADJMT-Value by Product		Search	Print
1	Payer Adjustment	Rp.	200.00
2	Payer Payment Due	Rp.	0.00
3	Payer Prepayment	Rp.	0.00
4	Payer Advance Input Tax Due	Rp.	1,000.00
5	Payer Advance Input Tax	Rp.	0.00
6	Payer Prepayment Return Due	Rp.	0.00

	2000-01	2001-02
State Government Expenditure	Rs 1,000.00	Rs 1,000.00
State Capital Expenditure	Rs 77.77	Rs 77.77
State Discretionary Expenditure	Rs 922.22	Rs 922.22
Capital Discretionary Expenditure	Rs 7.77	Rs 7.77
Current Discretionary Expenditure	Rs 914.44	Rs 914.44
Total Discretionary Expenditure	Rs 914.44	Rs 914.44
Capital Expenditure as % of Total Expenditure	7.77%	7.77%
Discretionary Expenditure as % of Total Expenditure	92.22%	92.22%

NET	REVENUE	NET
1. Stage Payer Production	\$4 (1,000)	

1	Waste From AT&T	Rp	2000
2	Steel Plates, Wrought, Express, Hammered	Ad	1000
3	Black Steel Furniture, Dresser, etc.		

Particulars of Capital & Gross Assets Lending		
Sr.	Description	Amount
1.	Rupee Notes - Demand	Rs. 10,000/-
2.	Rupee Notes - ATB	Rs. 10,000/-
3.	Rupee Notes Transferred Together Accounting	Rs. 10,000/-
4.	Rupee Notes Transferred - Returns Received by	Rs. 10,000/-
5.	Rupee Notes Transferred - Returns Received by	Rs. 10,000/-
6.	Provision Reserve	Rs. 10,000/-

2. Ausgabenstruktur	3. Investitionen
• Basis PPIG-Festlegungen	Rp. 26.000,-
• Basis PPIG Finanzielle Konsolidierung	Rp. 28.000,-
• Basis National Normen, Schaffung einer Basis für die internationale Bewertung	Rp. 28.000,-
• Basis PPIG-Standardisierung	Rp. 7.000.000,-
• PPIG-Normen	Rp. 12.000,-
• PPIG-Standardisierung	Rp. 22.000,-
• PPIG-Standardisierung	Rp. 30.000,-
• PPIG-Basis-Festlegungen	Rp. 28.000,-
• Basis PPIG-Konsolidierung, Rahmen-Normen	Rp. 10.000,-

Using *Artemia*, I can quickly obtain larvae and juveniles, despite larval hypotremia, because plasma from the Artemia can neutralize ammonia. Moreover, because the *Artemia* has a low mortality rate, it can be reared in large quantities. Finally, *Artemia* is a complete protein source.

Bare Minimum Patients - Preferred Prognostic Negligible Prognosis Tlegg / Unadjusted Age			
	Unadjusted	Adjusted	Unadjusted
Never			
Ever Screened	Sp = 0.00%		
Previously	Sp = 0.00%		
Early PDSP Logon	Sp = 0.00%		No patients
Early PDSP Enrollment	Cancer / Normal Person	Sp = 100%	No accrue
Years			

Item Summary

Yield	Rate
Interest Prepaid-Current	\$p - 10000
Bank 2010 Remington Capital	\$p - 10000
Long Term	\$p - 70000
Long Term	\$p - 70000
Bank Advances-Temporary	\$p - 40000

Item	Description	Unit	Value
1	Non-PDF Formulas	Page	1000
2	Programmed Functions	Formulas	1000
3	Logical Functions	Formulas	1000
4	Text Functions	Page	1000
5	Math Functions	Page	1000
6	Other Functions	Page	1000
7	Excel Functions	Page	1000
8	Word Processing Functions	Page	1000
9	Formulas	Total Value	9000

Comments
- Many different types of loans available. Starts \$1000-\$10,000.
- Interest rates fluctuate depending on market rates. Higher interest rates indicate
higher risk. These loans become due when the underlying asset is disposed.
- Investment manager can keep a portion of principal if they sell the asset at a profit.
- Liquidation fees negotiate until the time you have your asset liquidated or before you leave.

III. PERIODIC ASSESSMENT

TRANSACTIONS		Period	Comments
Receivable	10,000.00	10/01/2000	Initial Receivable
Bank Interest	10.00	10/01/2000	Interest Income
Bank Transaction Services	100.00	10/01/2000	Service Income
Bank Repayment Services	100.00	10/01/2000	Service Income
Bank Repayment Interest	10.00	10/01/2000	Interest Income
Bank Profit	10,000.00	10/01/2000	Initial Profit
Bank Prepayment Profit	100.00	10/01/2000	Profit Income

DATA 2020	Win Ship
Recreational	24 hr. min.
Recreational	24 hr. max.
Recreational	48 hr. max.
PERIODIC INSPECTION PERIODS	
Initial	By 10/06
After Repair	By 10/06
First Periodic Inspection	4 years maximum
Second Periodic Inspection	4 years maximum
Third Periodic Inspection	4 years maximum
Fourth Periodic Inspection	4 years maximum
DATA 2020	Win Ship
Recreational	4 years maximum
Recreational	10/06 (100%)
DATA 2020	Win Ship
PUBLIC ACTIVITIES	
PERIODIC INSPECTION PERIODS	
Initial	By 10/06
After Repair	By 10/06
Super Merchant Vessel	2 years minimum
Super Merchant Vessel	4 years maximum
Super Merchant Vessel	4 years maximum
Super Merchant Vessel	4 years maximum
Super Merchant Vessel	4 years maximum
DATA 2020	Win Ship
Recreational	By 10/06 (100%)
Recreational	By 10/06 (100%)
Recreational	4 years maximum
Recreational	4 years maximum
PERIODIC INSPECTION PERIODS	
Initial	By 10/06
After Repair	By 10/06
Super Merchant Vessel	2 years minimum
Super Merchant Vessel	4 years maximum
Super Merchant Vessel	4 years maximum
Super Merchant Vessel	4 years maximum
DATA 2020	Win Ship
Recreational	By 10/06
Recreational	By 10/06
Recreational	4 years maximum
Recreational	4 years maximum

Memberikan pembekalan kepada petugas PTSP dalam rangka peningkatan kompetensi pelaksana sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari kerja sebelum Petugas PTSP melaksanakan tugas.

Berikut kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak YM. H. Mohammad Pandji Santoso, S.H., M.H., Kegiatan ini juga dihadiri oleh Panitera Muda PHI, Ibu Andi Siti Nurasiawati, S.H., dan Ibu Muzdalifah Muslimin, S.H., M.H. pada hari Senin, tanggal 11 November 2024.

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS					
Jalan R.A. Kartini No. 18/23 Makassar			Nomor		
FORM NOTULEN			Tanggal		
BRIEFING PTSP			Halaman 1 dari 2		
LETTERANGAN LAMPIRAN					
WAKTU/TANGGAL Nomor: 11 November 2024					
LOKASI BRIEFING AREA PTSP					
MULAI WAKTU 08.15 AM/08.30 BRIEFING WITA BAPAT 08.30 WITA					
DOKUMEN/IMBAG					
PEMANGGUH JAWAB MOHAMMAD FANDY SANTOSO, S.H., M.M. (Wakil Ketua) ANNA UNTU MARASWATI, L.H. (Panitera Muda PTSP) MUZDALIFAH MOULANA, S.P., M.H. (Panitera Muda Pidana)					
NOTULEN BENUDIKTA TANDILINO, S.S.					
BAHASA MATERI BRIEFING					
CATATAN KEMIMPULAN					
<p>Briefing Pagt Briefing Pagt disampaikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Mohammad Fandy Santoso, S.H., M.M., Panitera Muda PTSP, Anna Untu Maraswati, L.H., dan Panitera Muda Pidana, Muazdalifah Maulana, S.P., M.H. untuk Persiapan Sidang Perkara Nomor: 18/23 Makassar tanggal 11 November 2024 berdasarkan persiapan yang telah dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas PTSP harus disiplin dan tidak ada pulang jemur dan mengeluh agar hal-hal diatas dan disampaikan untuk bertemu dengan amanah dan benar agar tidak dituduhkan - Bertemu dengan surat-surat yang berisi relevansi pada operasi STNK diminta agar jangan dilakukan <p>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</p>					
<p>Briefing Serr Briefing Serr disampaikan oleh Panitera Muda Muazdalifah Maulana, S.P., M.H. dan Panitera Muda PTSP, Lydia Sugih mengenai ketuntasan dan agar pihak-pihak lain yang akan mendengar PP jika ada pengajuan pelaksanaan yang masih berlangsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanyaan dari petugas PTSP, Sivana Murtika mengenai informasi dan Data Pelaksanaan. Lydia Sugih mengenai ketuntasan dan agar pihak-pihak lain yang akan mendengar PP jika ada pengajuan pelaksanaan yang masih berlangsung <p>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</p>					
<p>Briefing Seri Briefing Seri disampaikan oleh Panitera Muda Muazdalifah Maulana, S.P., M.H. dan Panitera Muda PTSP, Lydia Sugih mengenai ketuntasan dan agar pihak-pihak lain yang akan mendengar PP jika ada pengajuan pelaksanaan yang masih berlangsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Petugas PTSP wajib memerlukan persiapan apakah ada temuan atau temuan yang dilakukan selama melaksanakan tugas sejenjang pelaksanaan hari ini <p>Agar diperhatikan dan dicatat selisih yang terjadi</p>					

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS					
Jalan R.A. Kartini No. 18/23 Makassar			Nomor		
FORM NOTULEN			Tanggal		
BRIEFING PTSP			Halaman 2 dari 2		
Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Muda Nukus					
<p>- Produkten dibangun juga sambut serta tiba stand by di tempat bertemu melalui pengumuman layanan</p> <p>- Pertanyaan dari petugas PTSP, Sivana Murtika mengenai informasi dan Data Pelaksanaan. Lydia Sugih mengenai ketuntasan dan agar pihak-pihak lain yang akan mendengar PP jika ada pengajuan pelaksanaan yang masih berlangsung</p> <p>Briefing Seri Briefing Seri disampaikan oleh Panitera Muda Muazdalifah Maulana, S.P., M.H. dan Panitera Muda PTSP, Lydia Sugih mengenai ketuntasan dan agar pihak-pihak lain yang akan mendengar PP jika ada pengajuan pelaksanaan yang masih berlangsung</p> <p>- Petugas PTSP wajib memerlukan persiapan apakah ada temuan atau temuan yang dilakukan selama melaksanakan tugas sejenjang pelaksanaan hari ini</p>					
<p>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</p> <p>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</p> <p>Agar diperhatikan dan dilaksanakan</p>					

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS					
Jalan R.A. Kartini No. 18/23 Makassar			Nomor		
FORM NOTULEN			Tanggal		
BRIEFING PTSP			Halaman 3 dari 2		
TANDA TANGAN					
NOTULEN			DILAKUKAN		
NAMA LENGKAP & TTD			NAMA LENGKAP & TTD		
STAF PTSP <i>[Signature]</i>			WAKIL KETUA <i>[Signature]</i> MOHAMMAD FANDY SANTOSO, S.H. M.H.		
BENUDIKTA TANDILINO, S.S.			PANITERA MUDA PTSP <i>[Signature]</i> ANNUPTI MARASWATI, L.H.		
			PANITERA MUDA PIDANA <i>[Signature]</i> MUZDALIFAH MOULANA, S.P., M.H.		



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPA) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **3,65** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,643**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,893**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,821**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,107**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,393**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,607**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,714**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,857**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,643**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,857**;

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar TRIWULAN III Tahun 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **majoritas indikator memiliki indeks di atas 3,4 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi**.

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Hadiah. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada unsur terendah, sehingga untuk

melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

The screenshot shows a mobile application interface for a survey titled "Survey Persepsi Anti Korupsi".

Header: Beranda | SPAK | Detail

Survey Results:

Kategori	Jawaban	Persentase
1. Data Responden	Layanan Umum	78%
2. Data Kuesioner	Iuran korupsi SPAK	78%

Data Responden SPAK

Kolom	Detail
Nama	Eko Heryanto atau Eko di dil
Umur / Jenis Kelamin	47 Tahun / Laki-laki
Honor IPB	462
Denthalik	Pilih Wilayah
Pendidikan	Pilih Pendidikan
Pekerjaan	Pilih Pekerjaan

Footer: Beranda | Survey Anti Korupsi | Kontak Kami | Kembali | Help Center

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

The screenshot displays the user interface of the "APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK".

Dashboard: Shows the title "SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI" and a sub-section "Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK". It includes links for "Beranda", "Statistik", and "Kontak Kami".

Survey Form: Titled "Form Kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / perencanaan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan".

Form Fields:

- Data Responden:** Includes fields for "Nama serta data responden" and "Email".
- Layanan:** A section titled "Layanan yang Anda dapatkan" with a sub-section "Layanan yang Anda dapatkan". It lists "Jenis Layanan" (e.g., Pilih Layanan Yang Didapat, Pernah Menerima Layanan Ini, Sebelumnya ?) and "Kesamaan & pesan" (e.g., Pilih Layanan Yang Didapat).
- Buttons:** "Simpan", "Batal", and "Selesai" (Save, Cancel, Finish).

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Beranda Profil Kami

Dashboard SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survei Pelajari dan Komplain (SPAK)

Form konseling untuk survei bagi pengguna layanan / pemberi konseling yang mengacu pada tata integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden
Surat Keterangan Wawancara

Layanan
Laporan

Form Konseling
Form konseling pelajari dan komplain

Kesan & pesan
Menulis Kesan dan pesan anda

1 Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketertiban yang berlaku?
 Tidak Sesuai Prosedur
 Jarang Sesuai Prosedur
 Sering Sesuai Prosedur
 Selalu Sesuai Prosedur

2 Apakah dalam mempersiapkan layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyampaianan jabatan dan petugas untuk meminta imbalan tertentu?
 Petugas melayani selalu meminta imbalan
 Petugas melayani sering meminta imbalan
 Petugas melayani jarang meminta imbalan
 Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3 Pendukung utama dalam mencatat surat resmi (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

4 Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

5 Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

6 Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

7 Apakah menemui bukti transaksi keuangan / pembayaran yang salah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
 Tidak Pernah
 Jarang
 Sering
 Selalu

8 Apakah pernah mengalami ada praktik penyalahgunaan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

9 Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KN di Pengadilan ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

10 Apakah pernah mengurus perkara melalui Halim / Pantera / Staff Pengadilan di luar persidangan ?
 Selalu
 Sering
 Jarang
 Tidak Ada

Kembali Lanjutkan

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

The screenshot displays the 'Dashboard survey PERSEPSI ANTI KORUPSI' section. At the top, there are tabs for Beranda, Statistik, and Konsultasi. Below the tabs, there are two main sections: 'Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK' and 'Data Responden'. The 'Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK' section contains a sub-section titled 'Form kesiapan untuk survey bagi pengguna layanan / jenama kendali yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan'. This section includes a 'Layanan' button and a 'Data Responden' button. The 'Data Responden' button has a note: 'Nama teknisi responden' and 'Isikan nama teknisi responden'. The 'Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK' section also features a 'Konsultasi & pertanyaan' button with a note: 'Isi konsultasi dan pertanyaan anda'. On the right side of the dashboard, there is a 'Simpan Data' button.

Form kesiapan untuk survey bagi pengguna layanan / jenama kendali yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

Data Responden

• **Layanan**

• **Data Responden**

Konsultasi & pertanyaan

Isi konsultasi dan pertanyaan anda

Simpan Data

Dashboard survey PERSEPSI ANTI KORUPSI

Beranda

Statistik

Konsultasi

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kesiapan untuk survey bagi pengguna layanan / jenama kendali yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan

Layanan

Data Responden

Nama teknisi responden

Isikan nama teknisi responden

Konsultasi & pertanyaan

Isi konsultasi dan pertanyaan anda

Simpan Data



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jln. R.A. Kartini No. 13/23 KOTA MAKASSAR

SULAWESI SELATAN

<http://www.epp.makassar.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

SURVEY PERSEPSIANTIKORUPSI NILAI INDEKS 3,65 / 91,34 %	Jumlah	26 RESPONDEN
	Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 20 PEREMPUAN : 8
	Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 18 SMU : 2 S2 : 8 Diploma 1 : 0 S3 : 0
	Pekerjaan	PNS : 0 SWASTA : 6 TNI : 0 WIRASAUSAHA : 1 POLRI : 0 TENAGAKONTRAK : 0 LAINNYA : 21

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur

1. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ? 3,607
2. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,393
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktik KKN di Pengadilan ? 3,107

Tindak lanjut dari 3 unsur terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DILAKUKAN

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

1 Oktober 2024

Ketua Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri Makassar Kelas | A Khusus

-25-

LAMPIRAN II

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR